

Penegakan Hukum Tindak Pidana Perzinahan Di Kota Tanjungpinang

Oleh:

Sri Wina Ramadhany

190574201007

Abstrak

Perzinahan dipandang sebagai perbuatan dosa yang dapat dilakukan oleh pria maupun wanita, dan dipandang sebagai suatu penodaan terhadap ikatan suci dari perkawinan. Masalah delik perzinahan merupakan salah satu contoh aktual adanya benturan antara pemahaman dan pemahaman tentang zina dalam KUHP Pasal 284 dengan kepentingan/nilai sosial masyarakat, dimana delik perzinahan itu hanya bisa dituntut di muka hukum jika ada pengaduan dari suami/istri yang bersangkutan, atau biasa disebut delik aduan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan mengadakan penelitian di Wilayah Hukum Tanjungpinang yang berjudul: “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perzinahan Di Kota Tanjungpinang”. Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana upaya aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan, baik di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode empiris normatif yang dilakukan dengan cara wawancara kepada narasumber yang berkompeten dan berhubungan langsung dengan penulisan skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa Polres dan Kejari Tanjungpinang melakukan penegakan hukum melalui upaya Non Penal (Preventif) yakni penyuluhan berupa sosialisasi, patroli-patroli dan razia gabungan hotel hingga tempat hiburan malam, dan juga dilakukannya upaya Penal (Represif) yaitu melalui tahapan dalam proses peradilan pidana tersebut dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, yang selanjutnya diserahkan pada jaksa untuk pembuatan proses penuntutan yang akan dilanjutkan ke muka Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk penegakan hukum dalam mewujudkan kepastian hukum melalui pemeriksaan di muka pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Kemudian sarannya ialah agar aparat penegak hukum memberikan efek jera serta agar aparat pemerintah terkait bersosialisasi tentang masalah perzinahan sekaligus mengikutsertakan langsung masyarakat untuk ikut berpartisipasi membantu proses penegakan hukum tindak pidana perzinahan ini.

Kata Kunci : Zina, Delik Aduan, Penegakan Hukum.

Law Enforcement of the Crime of Adultery in Tanjungpinang City

By:

Sri Wina Ramadhany

190574201007

Abstract

Adultery is seen as a sinful act that can be committed by both men and women, and is seen as a desecration of the sacred bond of marriage. In Article 284 of the Criminal Code and the social interests/values of society, where the offense of adultery can only be prosecuted before the law if there is a complaint from the husband/wife concerned, or what is usually called complaint offense. Based on the background above, the author feels interested in studying and conducting research in the Tanjungpinang Legal Area entitled: "Law Enforcement of the Crime of Adultery in Tanjungpinang City". The formulation of the problem raised in this writing is how law enforcement officials attempt to enforce the law against the crime of adultery. This research was carried out using normative empirical methods which were carried out by interviewing competent sources and were directly related to the writing of this thesis. Based on the results of this research, it was concluded that the Tanjungpinang Police and Prosecutor's Office carried out law enforcement through Non-Penal (Preventive) efforts, namely counseling in the form of socialization, patrols and combined raids on hotels and night entertainment venues, and also carried out Penal (Repressive) efforts, namely through the stages in The criminal justice process starts from the inquiry and investigation stage by the police, which is then handed over to the prosecutor to prepare the prosecution process which will be continued before the Tanjungpinang District Court for law enforcement in realizing legal certainty through examination before the court, until the implementation of the decision. Then the suggestion is for law enforcement officials to provide a deterrent effect and for relevant government officials to socialize about the problem of adultery while directly involving the public to participate in helping the law enforcement process for this crime of adultery.

Keywords: *Adultery, Complaint Offense, Law Enforcement.*